

## DAFTAR REFERENSI

### BUKU

- Abdullah, M., dan Ruben, A. (1993). *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Darwata, I. G., dan Gusti Ngurah, A. M. (2017). *Buku Ajar Terminologi Kriminologi*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Endrawan, C. H. (2009). *Indonesia dan Rokok*. Jakarta: Grasindo.
- HR, R. (2002). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Husen, M. H. (1990). *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mertokusumo, S. (1999). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. (1983) *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Armico.
- Muhaimin. (1983) *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nawawi Arief, B. (2005). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . (1996) *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- . (2001) *Masalah Kebijakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nawawi Arief, B., dan Muladi. (2005). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, P. M. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soekanto, S. (2010). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sudarto. (1981). *Hukum dan Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- . (1986) *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung. PT. Cipta Bangun Gemilang.
- Syarif Fadillah, Chaerudin, & Dinar, S. A. (2008). *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Aditama.

- Abdul Wahid, & Fanny Tanuwijaya. (2005). *Refleksi Ketidakberdayaan Hukum dan HAM*. Jakarta: Edsa Mahkota.
- West, R. (2008). *Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi* (Edisi ke-3). Jakarta: Salemba Humanika.
- Masriani, Y. T. (2004). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

## JURNAL DAN SKRIPSI

- Addardiri, R. A. S., Masnun, M. A., & Hikmah, N. (2022). *Penegakan Sanksi Administratif Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Belajar Mengajar di Kota Surabaya*. Novum: Jurnal Hukum, No.4.
- Asrul Pratama. (2024) "Optimalisasi Penegakan Sanksi Administrasi Pada Pelanggar Peraturan Walikota Ambon Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Ambon." *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa 2*.
- Dachlan, R. R., & Wijaya, A. R. C. (2024). *Penegakan Hukum Perda Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok dalam Angkutan Umum*. Journal of Law and Nation, Vol 1.
- Daeng, Yusuf, A Haidar Muhammad Bagir, Hari Mustafa, and Dini Noviarti. (2023) "Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan" No 7.
- Dewi Untari Dewi, Nys. Arfa. (2021) *Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyalah Guna Narkotika*. Jambi: PAMPAS *Journal of Criminal Law Universitas Jambi*, Faculty of Law.
- Fatra Prahmana, Randi. (2021) "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Di Kota Jambi." *Repository universitas jambi* , no. 19.
- Hayat. (2017) "Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik." *Fungsi pelayanan publik* 29, no. 02.
- Hapidin, L., Hendrawati, S., & Hadi, H. H. (2024). *Analisis yuridis implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Pemerintahan Kota Cilegon*. Jurnal Dimensi Hukum, No 7
- Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik. (2023) "Perilaku Merokok Masyarakat Indonesia." *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*.
- . (2023) "Riset Kesehatan Dasar. Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan.," 2023.
- Juanita. (2012) "Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok: Peluang Dan Hambatan." *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*. Vol 01, no. 2

- Kesatu, Buku, Aturan Umum, Bab I I Pidana, Bab Iii, Hal-hal Menghapuskan, Memberatkan Pidana, Bab I V Percobaan, (1998) "Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II Jilid I)." *Repository UMY* 1, no. 1.
- M. Afandi. (2017) Tinjauan Konstitusional Prosedur Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Sebelum Dan Sesudah Perubahan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. *Universitas Riau Kepulauan*.
- Marchel, Yoshef Arieka. (2019). "Implementasi Kawasan Tanpa Rokok Sebagai Pencegahan Merokok Pada Remaja Awal." *Jurnal PROMKES* 7, no. 2
- Najamuddin, Alif. (2020) "Penegakan Hukum Terhadap Perokok Pada Kawasan Terbatas Rokok Di Pasar Tradisional Krempyeng Gresik" Vol 3.
- Nugroho Aldiansyah. (2024) "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Kawasan Tanpa Asap Rokok Berdasarkan Pasal 437 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar." *Universitas Tegal*.
- Pramayora, Irna, and Deppa Ringgi. (2024) "Studi Perbandingan: Penerapan Regulasi Kawasan Tanpa Rokok Di Indonesia Dengan Singapura Berdasarkan Komponen Sistem Hukum Lawrence M. Friedman." *Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik* 1, no. 3
- Rahardjo satjipto. (2006) Ilmu Hukum. *Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11.
- Saifannur, S., Wargadinata, E. L., & Suprajogo, T. (2022). Implementasi kebijakan KTR dan Kawasan Terbatas Rokok di Kecamatan Celala, Aceh Tengah. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*. No 5
- Sinurat, H. P., Yunita, E., & Sumanti, R. (2022). Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Pusat Pelatihan dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara. *KNIA Conference Proceedings*.
- Suryawai, Chriswardani, Lucia Ratna Kartikawulan dan Ki Hariyadi. (2012) "Konsumsi Rokok Rumah Tangga Miskin Di Indonesia Dan Penyusunan Agenda Kebijakannya." *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*. Vol 01.
- Susanto, P. E. (2024). Efektivitas Implementasi Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok Serta Peran Kesadaran dan Ketaatan Hukum di Wilayah Surabaya. *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum*, Vol. 7
- Zaidayati, Zaidayati, Lolita Sary, and Christin Angelina Febrianti. (2022) "Mendorong Perubahan Sikap Perokok Aktif Melalui Komunikasi Kesehatan Yang Efektif." *Holistik Jurnal Kesehatan* 16, no. 4.

## INTERNET

- Darmawan, Agus Dwi. "Data 2024: Jumlah Penduduk Kota Tanjung Pinang." *DataBoks*. Last modified 2024. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/data-2024-jumlah-penduduk-kota-tanjung-pinang-237-58-ribu-jiwa>.
- . "Penduduk Kota Tanjung Pinang Pada Tahun 2024." *DataBoks*. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik-penduduk-kota-tanjung-pinang-pada-2024-berusia-15-59-tahun>.
- Dinkes.ppkb. "Portal Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang." Last modified 2022. <https://dkp2kb.tanjungpinangkota.go.id/index.php/profil/visi-misi>.
- Emir Dhia Isad. "Jerat Pidana Pelanggar Kawasan Tanpa Rokok." *ILS Law Firm*. Last modified 2025. <https://www.ilslawfirm.co.id/jerat-pidana-pelanggar-kawasan-tanpa-rokok/>.
- Hukum, Info. "Perbedaan KUHP Lama Dan KUHP Baru." Last modified 2024. [https://fahum.umsu.ac.id/info/perbedaan-kuhp-lama-dengan-kuhp-baru/?utm\\_source=chatgpt.com](https://fahum.umsu.ac.id/info/perbedaan-kuhp-lama-dengan-kuhp-baru/?utm_source=chatgpt.com).
- Supriyati. "Pengertian Objek Dan Metode Penelitian Menurut Para Ahli." *Metodologi Penelitian Komputerisasi Akuntansi*. Last modified 2019. <https://www.skripsibisa.com/2021/11/pengertian-objek-dan-metode-penelitian.html>.
- Yanti, Pitri. "Tingkat Pengetahuan Dan Sikap Mengenai Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang." *Indonesian Conference On Tobacco Or Health*. Last modified 2022. <https://ictoh-tcscindonesia.com/tingkat-pengetahuan-dan-sikap-mengenai-peraturan-daerah-tentang-kawasan-tanpa-rokok-pada-mahasiswa-poltekkes-kemenkes-tanjungpinang/>.
- "Kota Tanjungpinang." *Wikipedia*. Last modified 2022. [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Tanjungpinang](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Tanjungpinang).
- Teori Penegakan Hukum Joseph Goldstein. 2022. <https://www.scribd.com/document/426567583/Teori-penegakan-hukum-Joseph-Goldstein>.
- Visi Misi Polresta Kota Tanjungpinang. Last modified 2023. <https://www.polrestatanjungpinang.id/misi>.
- Visi Misi Satpol PP Kota Tanjungpinang. *Tanjungpinang, Media Center Satpol PP Kota*. Last modified 2023. <https://satpolpp.tanjungpinangkota.go.id/>.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2003 Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan.

Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

